



**ANALISIS LAMBANNYA ADOPSI RENCANA AKSI
NASIONAL RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1325
SEBAGAI IMPLEMENTASI *WOMEN, PEACE AND SECURITY*
(WPS) *AGENDA* DI MYANMAR**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata I

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

PUTRI RAHMA ASRI

14010415130059

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon-Faksimile (024) 74605407 Laman:
www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Rahma Asri
Nomor Induk Mahasiswa : 14010415130059
Program Studi : SI Hubungan Internasional
Alamat : Jalan Kancil, RT 03 RW 04, Trayeman, Kecamatan
Slawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah 52414

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi/TA) yang saya tulis
berjudul:

***Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325
sebagai Implementasi Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar***

Adalah benar-benar Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri, bukan hasil karya ilmiah
orang lain dan juga tidak mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini
diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20%.

Apabila di kemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya
ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi
berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat
kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh
kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 16 Desember 2022

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.

NIP. 198503012025041001

Pembuat Pernyataan,

Putri Rahma Asri

NIM. 14010415130059

Ketua Program Studi

Dr. Dra. Reni Windiani, M.S.

NIP. 19650903198902200

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai
Implementasi *Women, Peace and Security (WPS) Agenda*
di Myanmar

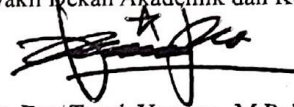
Nama Penyusun : Putri Rahma Asri
NIM : 14010415130059
Departemen : Hubungan Internasional

Dekan



Dr. Hardi Warsono, M.T
NIP. 19640827 199001 1 001

Semarang, 30 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 19690822 199403 1 003

Dosen Pembimbing:

1. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.


(.....)

Dosen Penguji Skripsi:

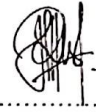
1. Marten Hanura, S.I.P., M.P.S.


(.....)

2. Dewi Setyaningsih, S.I.P., M.A.


(.....)

3. Palupi Anggraheni, S.I.P., M.A.


(.....)

MOTTO

*Imagine the woman you want to be.
What does her life look like? What daily habits does she have?
Start showing up as her everyday.
You don't become her like magic. You build her.*

- - -

May we know them, may we raise them, may we be them.

- - -

*“What has kept you inspired to continue work on and write about
WPS issues?”*

*“It can be disheartening when you see how patriarchal mindsets are
so entrenched, when you watch people making merely tokenist
changes, when you see the careful investigations our colleagues do in
warzones get put on the shelves to gather dust, when patriarchal
militarized ideas morph into their updated forms. So we do need to
keep crafting ways to maintain our collective feminist stamina.”*

-Cynthia Enloe

PERSEMBAHAN

To my best self

To mama and papa

To every woman working on peace and security

**ANALISIS LAMBANNYA ADOPSI RENCANA AKSI NASIONAL
RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 1325 SEBAGAI IMPLEMENTASI
WOMEN, PEACE AND SECURITY (WPS) AGENDA DI MYANMAR**

Abstrak

Konflik yang kompleks disederhanakan dengan memfokuskan pada eksistensi laki-laki dan mengaburkan pengalaman dan peran perempuan. Selama perang sipil dan rezim militer berlangsung, perempuan Myanmar telah terdampak secara tidak proposional yang menyebabkan ketidakamanan perempuan. Untuk mengakomodasi ketidakamanan perempuan dalam situasi konflik, Myanmar membutuhkan RAN Resolusi 1325. Namun, sampai saat ini Myanmar belum mengadopsi RAN Resolusi 1325. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menganalisis alasan lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 sebagai implementasi agenda WPS di Myanmar.

Tujuan penelitian eksplanatif ini untuk mengetahui faktor penyebab lambannya Myanmar mengadopsi RAN Resolusi 1325 melalui penjelasan dinamika gender institusi Myanmar dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan isu perempuan dan cara pandang dan cara pandang keamanan Myanmar terhadap Resolusi 1325 dalam lensa. Penelitian ini menggunakan konsep rezim gender dalam teori *Feminist Institutionalism* dan konsep posisionalitas dalam *Feminist Security Studies*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lambannya adopsi RAN Resolusi 1325 di Myanmar disebabkan oleh dua faktor. Pertama, pola rezim gender yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2022 tidak ramah isu gender dan terjadi regresi dari rezim *feminist presence and masculinist backlash* ke rezim *masculine hegemony* di mana rezim ini menghasilkan kebijakan buta gender. Kedua, posisionalitas Myanmar berlawanan dengan norma-norma yang terkandung di dalam Resolusi 1325. Pemerintah Myanmar juga semakin resisten untuk mengadopsi RAN Resolusi 1325 karena berkaca dari implementasi NSPAW 2013-2022 yang mendorong mereka untuk memastikan kepatuhannya terkait perempuan dalam situasi konflik.

Penelitian ini menyarankan organisasi masyarakat sipil Myanmar untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melokalisasi Resolusi 1325 dan mengoperasionalisasinya secara nasional. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menganalisis *Regional Action Plan on WPS ASEAN* yang diluncurkan pada Desember 2022 sebagai pedoman Myanmar dalam akselerasi adopsi RAN Resolusi 1325.

Kata kunci: RAN Resolusi 1325, agenda WPS, rezim gender, posisionalitas, militer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Lambannya Adopsi Rencana Aksi Nasional Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai Implementasi *Women, Peace and Security (WPS) Agenda di Myanmar*”** yang merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Reni Windiani, M.S. selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional. Terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan saran yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Mba Shary Charlotte, S.I.P., M.A. selaku dosen pembimbing seminar proposal. Terima kasih atas dukungan ide awal skripsi ini.
3. Mas Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas nasihat, bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Mba Palupi Anggraheni, S.I.P., M.A. selaku dosen pendamping skripsi. Terima kasih atas bimbingannya dan sudah percaya dan menumbuhkan keyakinan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Mba Sheiffi Puspapertiwi, S.I.P, M.A. dan Ibu Dr. Reni Windiani, M.S. selaku dosen wali. Terima kasih atas arahan selama menjalani perkuliahan.
6. Mama, papa, dan adik, yang memberikan doa, kepercayaan, semangat, motivasi, dan segalanya selama menempuh pendidikan.
7. *Women peacebuilders worldwide, especially in Southeast Asia and mainly in Myanmar who have been my source of inspiration to raise Women, Peace, and Security issue in this piece of work.*
8. Natalia A. Peral, PhD, *a lecturer in Conflict Resolution class during the exchange program at Mandalay University, Myanmar. Thank you for inspiring me to pursue this field academically and professionally.*
9. Para penyelia selama magang di SPT-Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Jawa Tengah dan di Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
10. Teman-teman HI Undip 2015 yang memiliki peran masing-masing di hidup penulis. *You know who you are.*

Penulis sadar penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik yang konstruktif diperlukan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun praktis.

Semarang, Desember 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Utama	8
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Akademis	9
1.4.2 Praktis	9
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	9
1.5.1 Feminist Institutionalism (FI)	10
1.5.2 Feminist Security Studies (FSS)	13

1.6 Operasionalisasi Konsep	16
1.6.1 Definisi Konseptual	16
1.6.1.1 Rencana Aksi Nasional	16
1.6.1.2 Women, Peace and Security (WPS) Agenda	16
1.6.1.3 Feminist Institutionalism (FI)	16
1.6.1.4 Feminist Security Studies (FSS)	17
1.6.2 Definisi Operasional	17
1.6.2.1 Rencana Aksi Nasional	17
1.6.2.2 Women, Peace and Security (WPS) Agenda	17
1.6.2.3 Feminist Institutionalism (FI)	18
1.6.2.4 Feminist Security Studies (FSS)	18
1.7 Argumen Penelitian	19
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Tipe Penelitian	20
1.8.2 Situs Penelitian	20
1.8.3 Subjek Penelitian	20
1.8.4 Jenis Data	20
1.8.5 Sumber Data	21
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data	21
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data	21
1.9 Sistematika Penulisan	22
BAB II WOMEN, PEACE AND SECURITY (WPS) AGENDA DALAM	
KONFLIK MYANMAR	23
2.1 Women, Peace and Security Agenda	23
2.1.1 Resolusi 1325 sebagai Tonggak Agenda WPS	24
2.1.2 Status Hukum Resolusi 1325	30
2.1.3 Lokalisasi Resolusi 1325 melalui Rencana Aksi Nasional	35

2.2 Pengadopsian RAN Resolusi 1325 oleh Negara-Negara Berkonflik	39
2.2.1 Afganistan	40
2.2.2 Sudan Selatan	42
2.2.3 Yaman	44
2.3 Isu Gender dalam Konflik Myanmar	46
2.3.1 Di antara Perang Sipil dan Rezim Militer	47
2.3.2 Ketidakamanan Perempuan Myanmar	53
2.4 Implementasi Women, Peace and Security Agenda di Myanmar	58
BAB III ALASAN LAMBANNYA ADOPSI RAN RESOLUSI 1325 SEBAGAI IMPLEMENTASI AGENDA WPS DI MYANMAR	64
3.1 Rezim Gender dalam Pembuatan Kebijakan Nasional Myanmar	65
3.1.1 Dinamika Feminin dan Maskulin Pasca Reformasi Politik Myanmar 2011	66
3.1.2 Hegemoni Maskulin Pasca Kudeta Militer 2021	73
3.1.3 Regresi Rezim Gender	80
3.2 Posisionalitas Myanmar terhadap RAN Resolusi 1325	83
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Simpulan	89
4.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Empat Pilar Resolusi 1325	26
Tabel 2.2 Rangkaian Resolusi Agenda WPS	27
Tabel 2.3 Peran Pemerintah Nasional dan Masyarakat Sipil dalam Melokalisasi RAN Resolusi 1325.....	37
Tabel 2.4 Alur Waktu Konflik Myanmar	47
Tabel 3.1 Rezim Gender	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	15
Gambar 2.1 Daftar Negara yang Sudah Mengadopsi RAN Resolusi 1325	35
Gambar 3.1 Bagan Analisis Rezim Gender	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Demografi Kelompok Etnis Myanmar	49
Grafik 2.2 Kesenjangan Data Gender dan Kinerja Negara Myanmar	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Kegiatan Wawancara114

DAFTAR SINGKATAN

AGIPP	: Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process
BWU	: Burmese Women’s Union
CDM	: Civil Disobedience Movement
CC	: Central Committee
CEC	: Central Executive Committee
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CRPH	: Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
CPB	: Communist Party of Burma
CRSV	: Conflict-Related Sexual Violence
CSW	: Commission on the Status of Women
CT/CVE	: Counter Terrorism/Countering Violent Extremism
DDR	: Disarmament, Demobilization, and Reintegration
DSW	: Department Social Welfare
EAOs	: Ethnic Armed Organisations
ECOSOC	: United Nations Economic and Social Council
EMReF	: Enlightened Myanmar Research Foundation
FI	: Feminist Institutionalism
FPS	: Feminist Political Science
FPTP	: First-past-the-post
FSS	: Feminist Security Studies
GEN	: Gender Equality Network
GEPI	: Gender Equity in Public Institutions
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPC	: High Peace Council
HRW	: Human Rights Watch
ICC	: International Criminal Court
ICJ	: International Court of Justice
ICRC	: International Committee of the Red Cross

IDPs	: Internal Displaced Persons
IIFMM	: Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar
ILO	: International Labour Organisation
KNDO	: Karen National Defence Organisation
KNU	: Karen National Union
KSBG	: Kekerasan Seksual Berbasis Gender
KWHRO	: Kuki Women’s Human Rights Organization
MGCSW	: Ministry of Gender, Child and Social Welfare
MNCWA	: Myanmar National Committee for Women’s Affairs
MoSAL	: Ministry of Social Affairs and Labor
MoWA	: Ministry of Women’s Affairs
MWO	: Mon Women’s Organization
NAP	: National Action Plan
NAPWA	: National Action Plan for the Women of Afghanistan
NCA	: Nationwide Ceasefire Agreement
NGO WG on WPS	: NGO Working Group on Women, Peace and Security
NI	: New Institutionalism
NLD	: National League for Democracy
NSPAW	: National Strategic Plan for the Advancement of Women
NUG	: National Unity Government
OHCHR	: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPCs	: Provincial Peace Councils
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RNGS	: Research Network on Gender Politics and the State
RAPoWPS	: Regional Action Plan on Women, Peace and Security
SHRF	: Shan Human Rights Foundation
SLORC	: State Law and Order Restoration Council
SOP	: Standard Operating Procedure

SAC	: State Administrative Council
SPDC	: State Peace and Development Council
SPLM	: Sudan People's Liberation Movement
SRRA	: Southern Sudan Relief and Rehabilitation Association
SSNAP	: South Sudan National Action Plan
SWAN	: Shan Women Action Network
TEC	: Township Executive Committees
UCDP	: Uppsala Conflict Data Program
UNDP	: United Nations Development Programme
UN PKO	: United Nations Peacekeeping Operations
UNHRC	: United Nations Human Rights Council
UNIFEM	: United Nations Development Fund for Women
UNMISS	: United Nations Mission in South Sudan
USDP	: Union Solidarity and Development Party
UU	: Undang-Undang
WLB	: Women's League of Burma
WILPF	: Women's International League for Peace and Freedom
WNC	: Women's National Committee
WON	: Women's Organizations Network
WPAs	: Women's Protection Advisors
WPS	: Women, Peace and Security